

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK MELALUI PENDIDIKAN  
KEWARGANEGARAAN PADA PESERTA DIDIK SMPN 1 MAJASARI  
KABUPATEN PANDEGLANG**

**Ida Mahardika**

Prodi PPKN Universitas Primagraha

[Idamahardika21@gmail.com](mailto:Idamahardika21@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pendidikan Politik melalui Pendidikan Kewarganegaraan pada Peserta Didik SMPN 1 Majasari Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini merupakan analisis peneliti mengenai pendidikan politik melalui pendidikan kewarganegaraan, dimana Pendidikan politik berfungsi untuk pembentukan karakter suatu bangsa, pendidikan politik diharapkan dapat mewujudkan suatu negara yang demokratis yang patuh pada hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya pembelajaran yang harus dilakukan sejak dini. Artinya pendidikan tersebut harus diberikan pada peserta didik. Hal ini mendorong pentingnya pendidikan politik di sekolah, dimana ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda yang bertanggungjawab dalam menyalurkan aspirasinya dalam membentuk pemerintahan yang baik. Pendidikan politik terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam pendidikan politik di sekolah, guru memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pendidikan politik. Oleh karena itu, guru memberikan pemahaman pendidikan politik. Disamping itu, semua guru berperan atas pendidikan politik melalui proses pembelajaran, artinya bukan hanya guru PPKn yang berperan secara aktif, tetapi semua guru di SMP Negeri 1 Majasari berperan untuk memberikan pengetahuan mengenai Pendidikan Politik. Pendidikan Politik di SMP Negeri 1 Majasari sudah diterapkan dengan baik. Peserta didik memiliki kesadaran politik dan sudah mendapatkan pemahaman mengenai Pendidikan Politik di SMP Negeri 1 Majasari.

**Kata Kunci :** Pendidikan Politik, Pendidikan Kewarganegaraan, Peserta Didik.

**ABSTARCT**

*This study aims to determine the implementation of political education through citizenship education for students at SMPN 1 Majasari, Pandeglang Regency. This study is a researcher's analysis of political education through civic education, where political education functions to form the character of a nation, political education is expected to create a democratic country that obeys the law. In this regard, there is a need for learning that must be done from an early age. This means that education must be given to students. This encourages the importance of political education in schools, where it aims to shape the character of the younger generation who are responsible for channeling their aspirations in forming good governance. Political education is contained in the subject of Citizenship Education. In political education in schools, teachers have an important role in increasing students' understanding of political education. Therefore, the teacher provides an understanding of political education. In addition, all teachers play a role in political education through the learning process, meaning that it is not only PPKn teachers who play an active role, but all teachers at SMP Negeri 1 Majasari play a role in providing knowledge about Political Education. Political education at SMP Negeri 1 Majasari has been implemented well. Students have political awareness and have gained an understanding of Political Education at SMP Negeri 1 Majasari.*

**Keywords:** *Political Education, Citizenship Education, Students.*

## LATAR BELAKANG

Pendidikan politik adalah salah satu fungsi politik yang dilaksanakan oleh struktur politik masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai, keyakinan-kepercayaan, pandangan tentang sistem politik melalui proses dialog, terbuka kritis, rasional dan kesadaran. Dengan adanya pendidikan politik diharapkan dapat meningkatkan kesadaran warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, untuk membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab diperlukan pendidikan yang berkualitas. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan meliputi demokrasi, Hak Asasi Manusia, Pendidikan Politik, Lingkungan Hidup, toleransi sosial dalam masyarakat. Dalam peraturan tersebut, dunia pendidikan harus dapat berposisi sebagai pandangan, wawasan politik agar Generasi Muda tidak apatis terhadap persoalan politik. Dalam kondisi sekarang, dimana pola pikir masyarakat semakin maju dan kritis baik rakyat maupun pemimpin pemerintah di negara yang demokratis diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan bagi setiap warga negara.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman politik bagi warga negara khususnya generasi muda/peserta didik tentu sekolah menjadi peran yang sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik dan kemampuan berpikir kritis serta peka terhadap keadaan sosial politik dengan meningkatkan juga pengetahuan demokrasi. Karena para peserta didik dengan usia 17 tahun ini sudah harus berpartisipasi aktif dalam dunia politik sehingga dapat menumbuhkan rasa kesadaran politik dimulai di sekolah. Dalam hal ini, peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai politik,

pendidikan politik yang sangat menentukan tingginya rasa kesadaran politik. Semakin awal seseorang mendapatkan ilmu pengetahuan politik maka semakin tinggi tumbuh kesadarannya untuk berpartisipasi langsung dalam demokrasi. Dalam usia ini, sangat menentukan arah proses pendidikan seseorang untuk mencoba menyerap berbagai konsep ilmu mengenai konsep pendidikan politik yang akan langsung mengaplikasikannya dan menanamkan hal-hal baru agar kelak tidak menjadi sasaran pembodohan politik tetapi sudah memiliki bekal dan pemahaman mengenai politik yang baik dan sehat.

Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan salah satu materi mengajarkan mengenai pendidikan politik, demokrasi, dalam menumbuhkan kesadaran politik peserta didik. Dimana tujuan diberikannya pengetahuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah bagaimana menjadi warga negara yang baik (*good citizen*), membentuk warga negara yang demokratis, warga negara yang cerdas, berkeadaban dan bertanggung jawab bagi keberlangsungan negara. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk peserta didik menjadi warga negara yang memiliki rasa nasionalisme

yang tinggi, rasa kebangsaan dan cinta tanah air sesuai Pancasila dan UUD 1945. peran tersebut tentu membentuk warga negara bertanggungjawab dan berpartisipasi. Melihat berbagai fenomena kehidupan saat ini, menjadi sangat penting bagi peserta didik diberikannya ilmu pendidikan politik melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan karena peserta didik adalah warga negara Indonesia dan sebagai generasi penerus yang harus memiliki intelektual, berkeadaban, berkemanusiaan dan cinta tanah air bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendasar mengenai pendidikan politik sangat penting melalui Pendidikan Kewarganegaraan agar kelak dapat berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan politik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:9) “Metode Kualitatif digunakan untuk mendapatkan data mendalam, suatu data yang mengandung makna”. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan nilai baik. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. Metode penelitian kualitatif adalah metode

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut Nazir (2007:93) “Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang”. Tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis, membuat gambaran secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, serta hubungan dengan fenomena yang diteliti.

#### **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Penelitian ini menggunakan metode Pengamatan (Observasi), menurut Sugiyono (2016:145) “Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah pengamatan dan ingatan”.

Dengan teknik seperti ini, maka peneliti menganalisis langsung dan melakukan penelitian pada peserta didik

di SMP Negeri 1 Majasari untuk memperoleh data penelitian yang diperlukan. Dengan metode ini, peneliti dapat mengetahui Implementasi Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Kewarganegaraan pada Peserta Didik di SMP Negeri 1 Majasari.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pendidikan Politik**

Pendidikan politik harus sejak dini diberikan materi melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Hal ini didukung oleh apa yang dikemukakan oleh Dewey (Thomas:2009) menyatakan bahwa menciptakan demokrasi di ruang kelas sekolah umum saat ini diberikan kesempatan untuk aktivitas demokrasi di kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh, memberikan kesempatan untuk membentuk prespektif pribadi, memilih/pemilihan ketua kelas, maka dari hal ini lah peserta didik akan menjadi pelaku demokrasi.

Kita ketahui sosialisasi politik adalah suatu proses dimana seseorang belajar tentang politik dan mengembangkan politik. Proses tersebut pada hakikatnya adalah upaya mempelajari dan mengembangkan nilai-nilai budaya politik masyarakat. Sosialisasi politik pada dasarnya adalah proses belajar baik dari pengalaman maupun dari tindakan. Sosialisasi politik

memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku politik dan kelompok mengenai pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik. Prosesnya adalah proses politik dalam pembentukan sikap para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik ini memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung. Gabriel A. Almond menjelaskan proses sosialisasi yaitu proses “pengajaran” nilai-nilai masyarakat dalam kebudayaan politik warga negara.

### **Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang wajib diberikan pada semua jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar, menengah sampai perguruan tinggi. yang menjadi tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah bagaimana menjadi warga negara yang baik (*good citizen*) yang dapat memahami nilai-nilai, kepribadian (*attitude*) yang mantap, berpandangan luas dan bersikap demokratis berkeadaban. Setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depan. Untuk itu, diperlukan penguasaan ipteks yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Nilai-nilai dasar tersebut

berperan sebagai panduan dan pegangan hidup setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Kewarganegaraan meliputi hubungan antara warga negara dengan negara, pendidikan bela negara yang mengandung nilai-nilai budaya serta dasar filosofi bangsa. Pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara serta membentuk sikap dan perilaku cinta tanah air yang bersendikan kebudayaan dan filsafat bangsa pancasila. Karakter kewarganegaraan merupakan sifat-sifat yang harus dimiliki setiap warga negara untuk mendukung efektivitas partisipasi politik, berfungsinya sistem politik yang sehat.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan kompetensi sebagai berikut:

1. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggungjawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat

indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa lain.

4. Berinteraksi dengan bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Pusat Kurikulum, 2003:3)

Pendidikan kewarganegaraan akan berhasil apabila menumbuhkan sikap mental yang bersifat cerdas dan penuh tanggungjawab pada peserta didik dengan perilaku yang beriman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghayati nilai-nilai falsafah bangsa, berbudi pekerti luhur, berdisiplin, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan peserta didik mampu memahami berbagai masalah yang dihadapi di masyarakat, bangsa dan negara secara tepat dan bertanggungjawab dalam rangka mencapai tujuan nasional menjadi warga negara yang baik sebagaimana Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang demokratis, yaitu warga negara yang cerdas, berkeadaban, dan bertanggungjawab bagi kelangsungan negara Indonesia.

#### **Implementasi Pendidikan Politik Melalui Pendidikan**

#### **Kewarganegaraan Pada Peserta Didik SMP Negeri 1 Majasari**

Sekolah menjadi peran yang sangat penting karena sekolah merupakan Lembaga Pendidikan yang mengembangkan potensi peserta didik agar mampu menghadapi tantangan pembangunan. Sebagaimana dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaga Pendidikan yaitu sekolah, SMP Negeri 1 Majasari dalam lingkungan sekolah tentu ada Kepala Sekolah, Guru, Peserta Didik serta komponen-komponen yang terlibat didalamnya.

Pendidikan politik berfungsi untuk pembentukan karakter suatu bangsa, dimana pendidikan politik diharapkan dapat mewujudkan suatu negara yang demokratis yang patuh pada hukum. Adapun sebagai ciri dari sebuah negara demokratis adalah adanya kebebasan berserikat dan berkumpul untuk menyatakan pendapat sesuai dengan hati nurani. Kebebasan berpendapat ini dapat dipresentasikan pada kebebasan memilih pada penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya pembelajaran yang harus dilakukan sejak dini. Artinya pendidikan tersebut harus diberikan pada peserta didik. Pendidikan politik sudah harus diberikan di sekolah-

sekolah bertujuan untuk membentuk kesadaran warga negara yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Hal ini mendorong pentingnya pendidikan politik di sekolah, dimana ini bertujuan untuk membentuk karakter generasi muda yang bertanggungjawab dalam menyalurkan aspirasinya dalam membentuk pemerintahan yang baik.

Dalam Kurikulum Mata Pelajaran yang diberikan di SMP Negeri 1 Majasari juga dilakukan Pendidikan Politik yang diajarkan melalui mata pelajaran PPKn. Dimana pada mata pelajaran ini peserta didik akan dapat membiasakan membahas tema-tema politik. Dalam pendidikan politik di sekolah, peran guru sangat penting dalam proses pembelajaran pendidikan politik.

Pendidikan politik di SMP Negeri 1 Majasari sudah dilakukan dan diberikan pada mata pelajaran PPKn, sudah efektif apabila dilihat dari segi kurikulum dan peran gurunya. Melalui kurikulum, pendidikan politik lebih khusus pada mata pelajaran PPKn, dimana lebih memfokuskan pada penguasaan dan pengembangan materi pendidikan politik, materi demokrasi, materi sosialisasi politik untuk mewujudkan pendidikan politik peserta didik. Serta diajarkan juga tentang pemahaman nilai, tanggungjawab,

kedisiplinan, menghargai antar sesama, menghargai guru, maupun menghargai pimpinan/kepala sekolah. Dalam hal ini, guru PPKn berperan atas pendidikan politik secara aktif maupun guru-guru yang yang lain pun berperan dalam membentuk pemahaman mengenai pendidikan politik pada peserta didik SMP Negeri 1 Majasari.

Hasil dari analisis yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 1 Majasari bahwa pendidikan politik melalui pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran politik peserta didik serta meningkatkan pemahaman pendidikan politik, politik demokrasi pada peserta didik. Hal ini sangat berkaitan dengan materi yang ada didalam mata pelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Majasari.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan mengenai pendidikan politik dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pendidikan politik terdapat dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam pendidikan politik di sekolah, guru memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai pendidikan politik. Oleh karena itu, guru memberikan pemahaman pendidikan politik dan mengenai demokrasi.

Disamping itu, semua guru berperan tas pendidikan politik melalui proses pembelajaran, artinya bukan hanya guru PPKn yang berperan secara aktif, tetapi semua guru di SMP Negeri 1 Majasari berperan untuk memberikan pengetahuan mengenai Pendidikan Politik. Pendidikan Politik di SMP Negeri 1 Majasari sudah diterapkan dengan baik. Peserta didik memiliki kesadaran politik dan sudah mendapatkan pemahaman mengenai pendidikan Politik di SMP Negeri 1 Majasari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Eko Handoyo, Lestari. 2017. PENDIDIKAN POLITIK. Yogyakarta: Pohon Cahaya
- Sugiyono. 2017. Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Jakarta: Alfabeta
- Winarno. 2016. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.